



**KONFLIK SOSIAL PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN
DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada
Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Muh. Ichsan Rustiana

3312412005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Moh. Ichsan Rustiana NIM 3312412005 Program Studi Ilmu Politik dengan Judul Konflik Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah telah disetujui untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juli 2019

Semarang, Juli 2019

Pembimbing I



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM,
NIP.197207242000031001

Pembimbing II



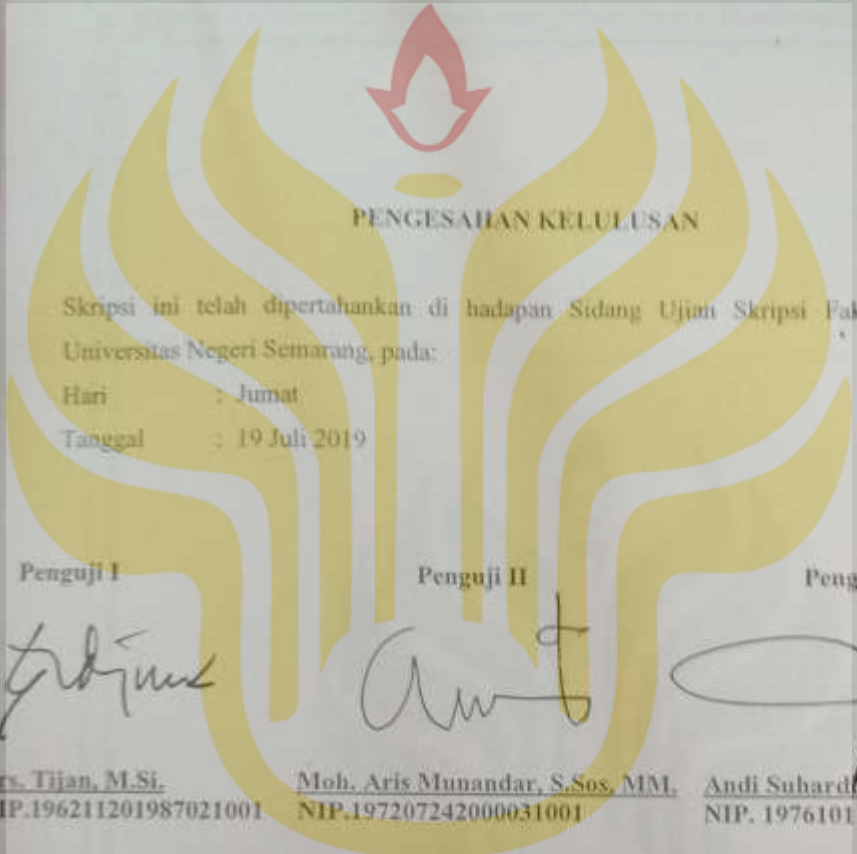
Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si,
NIP. 197610112006041002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan - FIS
Universitas Negeri Semarang



Drs. Tjani, M.Si,
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Juli 2019

Penguji I

Drs. Tijan, M.Si.
NIP.196211201987021001

Penguji II

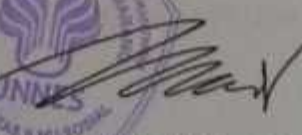
Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.
NIP.197207242000031001

Penguji III

Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si.
NIP. 197610112006041002

UNNES

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar - benar hasil dari karya saya sendiri, bukan jiplak karya tulis orang lain, sebagian besar atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2019

Muh. Ichsan Rustiana

3312412005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al-Insyirah:6,7, dan 8).

Persembahan :

1. Kedua orang tuaku Bapak Rustono dan Ibu Istiningsih atas doa dan perjuangannya
2. Kakakku Kukuh Nugraha Rustiana tersayang
3. Sahabat-sahabat ku atas doa dan motivasi dan bantuannya
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2012
5. FIS UNNES tercinta
6. Almamaterku

PRAKATA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul "*Konflik Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*" dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak, dengan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Drs. Trijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan ijin penelitian.
4. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, dan masukan serta dukungannya.
5. Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, dan masukan serta dukungannya.
6. Keluarga, Desa, warga masyarakat, dan Regaldown yang telah banyak membantu peneliti.

7. Teman-teman Ilmu Politik 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebajikan yang diberikan, dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap, hasil penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, serta dapat menjadi masukan yang baik bagi berbagai pihak.

Semarang, Juli 2019



Penulis

Muh. Ihsan Rustiana



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Rustiana, Muh. Ichsan. 2019. *Konflik Sosial Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Pertama: Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM. Pembimbing Kedua: Andi Suhardiyanto S.Pd, M.Si, 128 halaman.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pembangunan, Pabrik Semen.

Berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat terkait dengan pembangunan PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem. Tanggapan yang munculpun beragam, mulai dari mendukung maupun menolak pembangunan pabrik semen. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis (1) mengetahui tanggapan masyarakat Desa Tegaldowo baik yang pro maupun kontra terkait pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, (2) mengetahui faktor yang melatarbelakangi konflik pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Alat dan teknik pengumpulan data berupa wawancara birokrasi terkait dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan dianalisis secara kualitatif yang meliputi pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masyarakat yang pro terhadap pabrik semen yaitu mereka mendukung karena dengan adanya pabrik semen dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tegaldowo. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap adanya pabrik semen yaitu mereka menolak karena khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi hasil pertanian, (2) faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial dilihat dari masyarakat yang pro yaitu faktor sosial-ekonomi dan faktor imbalan (uang). Sedangkan pada masyarakat yang kontra terhadap adanya pabrik semen yaitu faktor lingkungan alam dan faktor hukum.

Saran penelitian yaitu keterlibatan warga di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting karena pada dasarnya warga yang akan merasakan manfaat dan dampak langsung dari pembangunan yang dilaksanakan. Sebagai alternatif penyelesaian konflik, pemerintah perlu melakukan upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi. Negosiasi dilakukan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu warga, pemerintah serta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sehingga diperoleh keluaran konflik yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

ABSTRACT

Rustiana, Muh. Ichsan. 2019. *Social Conflict Effect of the Cement Factory Development in Gunem District Rembang Regency Central Java Province.* Final Project, Politic and Citizenship Department, Political Science Program, Social Science Faculty, Universitas Negeri Semarang. First Advisor: Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM. Second Advisor: Andi Suhardiyanto S.Pd, M.Si, 128 page.

Keywords: Social Conflict, Development, Cement Factory

Various responses emerged in the community related to the construction of PT. Semen Indonesia in Gunem District. The responses that emerged also varied, ranging from supporting and rejecting factory construction. The purpose of this study was to analyze (1) knowing the responses of Tegaldowo's community both the pros and cons related to the construction of the Semen Indonesia Plant in Gunem District, Rembang Regency, (2) knowing the underlying factors of the conflict in the construction of the Semen Indonesia Plant in Gunem District, Rembang Regency.

The method of this research is qualitative research. Sources of research data include primary and secondary data sources. Data collection tools and techniques are interviews to the related bureaucracy and documentation. Validity of the data is tested using source triangulation techniques and analyzed qualitatively which includes data collection; data reduction; presentation of data; and conclusions.

The results of the study showed that (1) the people who were pro to the cement plant, they agreed because the existence of a cement plant could bring progress and prosperity to the Tegaldowo community. Whereas the people who contradicted the existence of a cement factory, they did not agree because they were worried that there would be environmental damage and had a negative impact on agricultural products, (2) the factors behind the occurrence of social conflict are seen from the pro-society, namely socio-economic factors and reward factors (money). Whereas the people who contradict the existence of cement factories are natural environment factors and legal factors.

Suggestion from this research are citizen involvement in development activities is very important because people will feel the benefits and direct impacts of the development carried out. As an alternative to conflict resolution, the government needs to make efforts to resolve conflicts through negotiations. Negotiations were conducted to bring together the desires of the parties involved in the conflict, namely residents, the government and PT Semen Indonesia (Persero) Tbk to obtain a win-win solution.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rumusan Masalah	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Batasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	
A. Deskripsi Teoretis	10
B. Kerangka Befikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Latar Penelitian	43

C. Fokus Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Alat & Teknik Pengumpulan Data	46
F. Validitas Data	49
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
2. Tanggapan Masyarakat Desa Tegaldowo terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	62
a. Tanggapan masyarakat yang pro terhadap pembangunan Pabrik Semen Indonesia	64
b. Tanggapan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan Pabrik Semen Indonesia	76
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konflik Pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	98
a. Faktor yang mempengaruhi masyarakat pro terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia	98
b. Faktor yang mempengaruhi masyarakat kontra terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia	102

B. Pembahasan	
1. Tanggapan Masyarakat Desa Tegaldowo yang Pro maupun Kontra terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	105
2. Faktor yang Melatarbelangi Terjadinya Konflik Pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	116
a. Faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat yang pro pada pembangunan pabrik semen Indonesia.....	116
b. Faktor yang berpengaruh pada masyarakat yang kontra terhadap pembangunan Pabrik Semen Indonesia	119
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	128

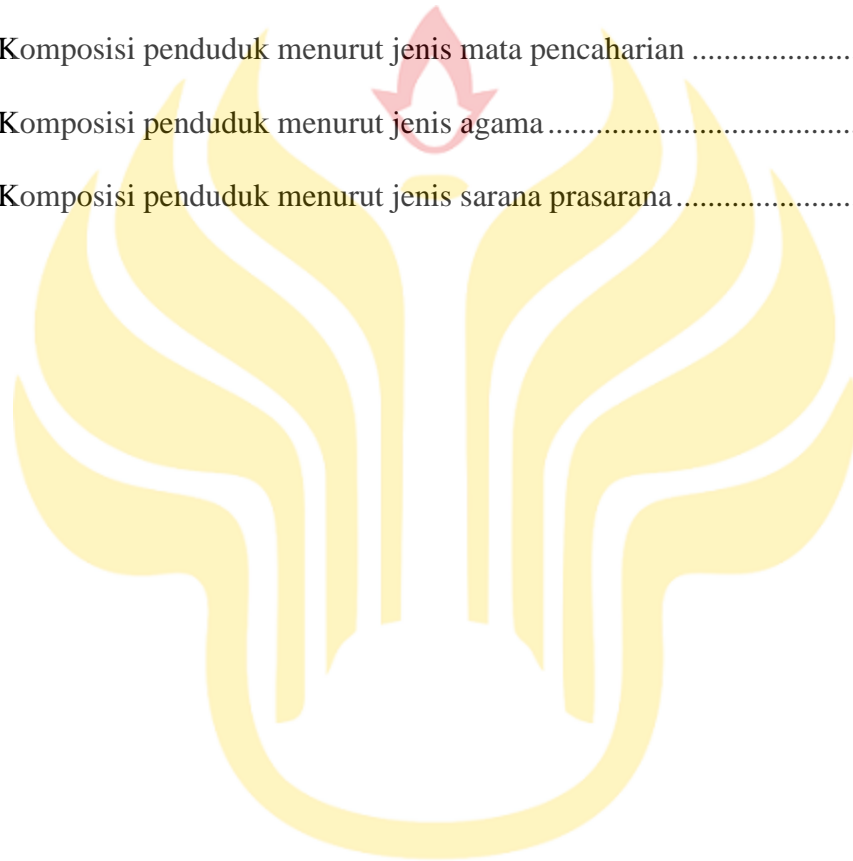


DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berfikir	42
4.1	Kondisi Pegunungan Kendeng di sekitar Desa Tegaldowo	58
4.2	Bangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Indonesia.....	62
4.3	Embung atau waduk Desa Tegaldowo	74
4.4	Bantuan bedah rumah oleh PT. Semen Indonesia	76
4.5	Aksi blokir jalan oleh Ibu-ibu pada peletakan batu pertama tanggal 16 Juni 2014	83
4.6	Hasil pertanian jagung warga Desa Tegaldowo	84
4.7	Debu yang berkeliaran di sekitar rumah warga Desa Tegaldowo	86
4.8	Tenda perjuangan warga kontra.....	88
4.9	Pembakaran tenda oleh oknum	90
4.10	Aksi long march oleh warga yang tergabung dalam JMPPK	95
4.11	Mendirikan tenda di depan	97
4.12	Pengecoran kaki oleh Ibu-ibu di depan Istana Presiden	98

DAFTAR TABEL

4.1	Komposisi penduduk menurut jenis pendidikan.....	53
4.2	Komposisi penduduk menurut jenis mata pencaharian	54
4.3	Komposisi penduduk menurut jenis agama.....	55
4.4	Komposisi penduduk menurut jenis sarana prasarana.....	55



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumberdaya alam merupakan entitas dari lingkungan hidup yang semestinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melihat dari manfaat yang dihasilkan, sumberdaya alam seharusnya memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup, khususnya manusia di sekitar lokasi adanya sumberdaya (masyarakat lokal). Akan tetapi, manfaat tersebut kini menjadi sesuatu yang dapat dipolitisir oleh sebagian pihak (oknum).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan, akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Akibat buruk yang dimaksud, seperti; kerusakan lingkungan, polusi udara, pencemaran air, hilangnya sumber air di sekitar area pertambangan, dll. Namun demikian, tidak berarti pembangunan tidak boleh atau tidak perlu dilakukan.

Pembangunan penting dilakukan karena akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Perencanaan suatu pembangunan harus memperhatikan semua aspek secara integral dan komprehensif, seperti ekonomi,

sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan yang demikian, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, serta dapat diambil kemanfaatannya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.

Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sektor pertanian Kabupaten Rembang merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat. Keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Rembang kini memiliki ancaman dengan hadirnya beberapa usaha tambang yang memanfaatkan kars. Keberadaan kars yang terdapat di Rembang merupakan batuan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Salah satu daerah Kabupaten Rembang yang memiliki potensi tambang kars adalah kawasan Watuputih yang berada di Kecamatan Gunem.

Pro dan kontra masih mewarnai pemanfaatan karst Kabupaten Rembang oleh PT. Semen Indonesia. Berbagai aksi penolakan pun diperlihatkan oleh warga Rembang. Kedua kelompok ini masing-masing mempertahankan pandangannya dalam menyikapi pembangunan pabrik semen. Adapun peristiwa-peristiwa yang sering terjadi meliputi, kekerasan dalam konflik, tenda perlawanan, perubahan hubungan sosial masyarakat serta aksi unjuk rasa di berbagai tempat. Beberapa peristiwa kekerasan dan intimidasi yang dirasakan oleh warga saat berunjuk rasa, para aparat membubarkan secara paksa mereka saat menolak pembangunan semen di tapak pabrik PT. Semen Indonesia. Tidak hanya TNI dan Polri yang terlibat, bahkan sekumpulan preman juga turut melakukan intimidasi guna membubarkan

warga yang bersikeras untuk membuat blokade terhadap truk yang akan masuk ke dalam lokasi pembangunan pabrik.

Demonstrasi dan pemasangan poster-poster terkait penolakan adalah salah satu aksi yang sering dilakukan oleh warga yang kontra pembangunan pabrik semen. Tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan karst merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi industri semen. Batu gamping yang merupakan penyusun bentang alam karst merupakan penghasil kalsium karbonat, dimana hampir 70-80 persen bahan baku semen merupakan batu gamping. Namun, kawasan karst juga mempunyai nilai lingkungan yang tinggi, yakni sebagai kawasan penyimpan air tanah dan perlindungan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang tinggi. Nilai lingkungan tersebut sangatlah penting bagi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan ekosistem sekitar kawasan karst.

Memang menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten Rembang dan provinsi Jawa Tengah, mengingat wilayah ini sangat membutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, jika ditelisik lebih lanjut di masa sekarang dimana pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa pemanfaatan kawasan lindung untuk industri selalu menyisakan kerusakan lingkungan yang masif. Meskipun PT. Indocement mengatakan bahwa pembangunan usahanya sudah mengantongi dukungan dari pejabat-pejabat di lingkup pemerintah kabupaten dan propinsi, serta AMDAL pun juga sudah keluar. Investasi industri semen memang sangat besar nilai ekonominya.

Selain masyarakat Rembang secara umum dan masyarakat Kecamatan Gunem secara khususnya, juga pemerintah ataupun pejabat daerah, terlibat pula LSM ataupun

gerakan sosial lainnya yang pro dan kontra dengan pendirian pabrik semen. LSM dan gerakan sosial yang kontra adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup bagi generasi mendatang. Salah satu gerakan sosial yang sampai sekarang masih menolak adanya pembangunan pabrik tersebut yaitu Aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng (AWRPPK). Sedangkan salah satu dari pihak yang mendukung pembangunan pabrik semen yang mengatasnamakan dirinya sebagai Serikat Masyarakat Untuk Transparansi Pembangunan (Semut Abang) mendukung dengan alasan banyak warga disana yang pengangguran, mereka beranggapan dengan berdirinya pabrik tersebut maka secara tidak langsung akan menambah lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar pabrik.

Menurut pendataan Aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng (AWRPPK), telah ditemukan bukti-bukti lapangan di kawasan cekungan air tanah Watuputih Rembang, yakni 109 mata air, 49 goa, dan empat sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit bagus, serta fosil-fosil yang menempel pada dinding goa. Dari data ini sudah sepatutnya pemerintah propinsi Jawa Tengah dan kabupaten Rembang harus berpikir matang untuk menerbitkan ijin pemanfaatn karst kepada industri semen. Terancamnya sumber-sumber mata air yang menjadi kebutuhan dasar, bukan hanya bagi petani namun juga bagi warga secara keseluruhan. Maka sangat beralasan jika warga bergerak melakukan aksi penolakan atas pendirian pabrik semen tersebut.

Gunung Kendeng sendiri merupakan pegunungan karst yang membentang meliputi empat kabupaten, diantaranya Kabupaten Pati, Grobogan, Rembang, dan

Blora. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan yang memiliki bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi. Sehingga, rencana pertambangan pabrik semen yang berada di kawasan karst termasuk dalam kategori kawasan lindung. Pegunungan Karst Gunung Kendeng juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Terdapat 24 jenis flora yang diantaranya adalah Mahoni, Jambu Mete, Randu Kapuk, Randu Alas, Kepuh. Sedangkan untuk faunanya, terdapat 45 jenis burung, 11 jenis mamalia, 1 jenis herpetofauna yaitu ular Sanca Kembang, dan juga jenis-jenis dari arthropoda dan mollusca.

Selain memiliki keanekaragaman yang melimpah, Gunung Kendeng pun menjadi sumber mata air bagi masyarakat sekitarnya. Terdapat sekitar 109 mata air di dalam Gunung Kendeng yang menghidupi masyarakat sekitarnya. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, maupun untuk kebutuhan pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, kehadiran pabrik semen secara otomatis akan menimbulkan berbagai macam perubahan bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar Gunung Kendeng. Berbagai jenis aktor turut campur tangan untuk mempertahankan kepentingannya terhadap Gunung Kendeng. Masyarakat Kecamatan Gunem, pemerintah daerah, LSM/Gerakan Sosial, dan juga PT. Semen Indonesia adalah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan yang terjadi terhadap Gunung Kendeng.

Beberapa penelitian konflik sebelumnya sudah pernah dilaksanakan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan Ma'arif (2014) dengan judul Gerakan Perlawanan LSM Cagar Tuban terhadap Pembangunan PT. Holcim Indonesia. Penelitian tersebut menekankan kajiannya pada gerakan perlawanan LSM Cagar Tuban mengahadapi

rencana pembangunan PT. Holcim Indonesia. Gerakan yang dilakukan LSM Cagar Tuban merupakan manifestasi kepemimpinan organik serta respon akan hegemoni yang dilakukan pabrik untuk menaklukkan masyarakat.

Risalatul, dkk (2014) dengan judul Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik tanah, akan tetapi konflik lingkungan. Pihak yang berkonflik terbagi menjadi dua yaitu pihak pro terhadap tambang dan pihak yang kontra dengan kegiatan pertambangan. Pihak yang pro terhadap tambang terdiri dari masyarakat pro tambang, PT. Antam dan pemerintah. Pihak yang kontra terhadap tambang terdiri dari masyarakat kontra tambang serta berbagai pihak pemerhati lingkungan. Pihak pertama, mengusung kepentingan ekonomi, sedangkan pihak kedua mengusung kepentingan lingkungan. Penolakan akan kegiatan pertambangan diperlihatkan dengan sejumlah aksi demonstrasi serta membuat surat penolakan kegiatan tambang. Perjuangan masyarakat kontra juga sampai ke lembaga peradilan, diawali adanya empat warga Desa Wotgalih yang kontra tambang dianggap telah melakukan tindakan pidana yaitu perbuatan tidak menyenangkan atau pengeroyokan, hingga terjadilah perselisihan atas rencana pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih.

Selain itu, kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih memberikan dampak terhadap lingkungan tambang, baik dampak lingkungan sosial maupun fisik. Dampak fisik yang muncul akibat pertambangan pertama tahun 1998 adalah adanya lubang besar yang ditinggalkan setelah proses pertambangan. Dampak fisik lain yang timbul adalah rusaknya jalan serta abrasi pantai. Dari segi sosial, adanya rencana

memperpanjang izin pertambangan oleh PT. Antam dan didukung oleh pemerintah menimbulkan konflik secara vertikal maupun horisontal dalam masyarakat.

Berbagai penelitian yang sebelumnya telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian yang dilakukan penulis belum pernah dilaksanakan. Selain itu, penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan digunakan penulis untuk perbandingan maupun masukan dalam melakukan penulisan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan masyarakat baik yang pro maupun kontra terkait pembangunan pabrik semen di kecamatan Gunem oleh PT. Indocement?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik pembangunan pabrik semen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggapan masyarakat Desa Tegaldowo baik yang pro maupun kontra terkait pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi konflik pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Manfaat Teoretis dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan acuan dan memberikan sumbangan bagi pengembang Ilmu Politik, khususnya dalam peran masyarakat.

2. Manfaat praktis

a) Bagi peneliti, dapat mengetahui kronologi konflik sosial terkait dengan pembangunan pabrik semen.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang supaya tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mentaati peraturan hukum yang ada.

c) Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi kajian analisis dalam penelitian mengenai ekologi politik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai studi konflik ekologi politik terkait pegunungan karst.

E. Batasan Istilah

1. Konflik

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik sosial pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

2. Pembangunan Pabrik Semen

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembangunan fisik berupa pendirian pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Pengoperasian pabrik semen Indonesia, berencana akan melakukan penambangan di lokasi sekitar Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Teori Konflik

a. Pengertian Konflik

Sejauh ini konflik dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbedaan atau pertentangan yang terjadi diantara para pihak. Konflik juga dimaknai sebagai akibat dari terbatas atau keterbatasannya ‘sesuatu’ sehingga menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan harus berkompetisi untuk mendapatkannya atau menguasainya. Konflik sendiri selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan satu sama lainnya. Sementara itu menurut Wirawan (2010), konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Konflik dapat menciptakan konsensus

dan integrasi. Oleh sebab itu, proses konflik sosial merupakan kunci adanya struktur sosial. Dahrendrof berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu (Poloma 2007: 135-136).

b. Jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes (*Conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan (Wirawan 2010: 55). Konflik juga dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yaitu :

1. Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

2. Konflik horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

c. Faktor Penyebab Konflik

Upreti (2001) menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh konteks sosial (organisasi dan struktur masyarakat), pola interaksi (meningkat atau menurun), cara (antara lain : kekerasan, ketidakcocokan), waktu (spesifik dari periode waktu), kepercayaan terhadap kelompok yang berkonflik dan derajat ketidakcocokan tujuan mereka dan struktur kekuatan. Konflik terjadi karena adanya pihak-pihak yang ingin menguasai sesuatu dan kepentingannya saling bertentangan. Faktor konflik sumberdaya alam dalam kajian ekologi sangat beragam. Suatu konflik sumberdaya alam dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi antar aktor pengelola yang mana kemudian menjadi penyebab munculnya konflik. Selain itu pula, ketidakjelasan batas-batas wilayah kelola juga kerap kali menjadi faktor yang paling dominan karena masing-masing aktor akan saling mengakuisisi. Seperti yang ditulis oleh Rachman (2013) menyebutkan sebab-sebab terjadinya konflik, diantaranya :

1. Pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstrasi, maupun konservasi.
2. Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan

raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

3. Eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut.
4. Perlawanan langsung dari rakyat sehubungan eksklusi tersebut.

Faktor-faktor konflik termasuk sumber-sumber konflik juga dijelaskan oleh Tadjudin (2000), antara lain yaitu perbedaan. Perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda, namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Pihak lain bisa dipersepsikan memiliki sesuatu yang berbeda dan pihak lain dicurigai sebagai berbeda, meski secara obyektif sama sekali tidak terdapat perbedaan. Menurut Tadjudin (1999) perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran, antara lain : (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaanakuan hak kepemilikan (klaim). Penyebab konflik yang ditekankan oleh Fisher et al. (2001) adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu- isu ini muncul ketika mengamati interaksi antarpihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam. Sedangkan menurut Wiese dan Becker in Soekanto (2006) yang melatarbelakangi adanya konflik atau pertentangan:

a. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.

c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan.

d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

d. Sebab Terjadinya Konflik

Perbedaan dan pertentangan yang terjadi diantara aktor biasanya berawal dari hal-hal yang menurut Francis (2006) sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.

2. Struktur

Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang

terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

3. Pribadi

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

e. Tipe – Tipe Konflik

Kartikasari (2001) mengatakan, dalam suatu konflik akan digambarkan persoalan-persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri atas tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan, berikut ini penjelasan dari tipe-tipe konflik menurut Kartikasari (2001) :

1. Tanpa konflik, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai itu lebih baik, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik terbuka, adalah yang berakar dari semangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
4. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi..

f. Akibat Dari Adanya Konflik

Hadirnya konflik menimbulkan berbagai akibat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain (Wirawan 2010: 106-109):

1. Bertambahnya solidaritas/in-group

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan tambah erat.

2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.

3. Adanya perubahan kepribadian individu

Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia.

5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

g. Manajemen Konflik

Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa

pola tertentu. Pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Wirawan 2010: 134).

1. Koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih lemah. Misalnya, sistem pemerintahan totalitarian.
2. Kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Misalnya, perjanjian gencatan senjata antara dua negara.
3. Arbitrasi, yaitu terjadi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Misalnya, penyelesaian pertentangan antara karyawan dan pengusaha dengan serikat buruh, serta Departemen Tenaga Kerja sebagai pihak ketiga.
4. Mediasi, seperti arbitrasi namun pihak ketiga hanya penengah atau juru damai. Misalnya, mediasi pemerintah RI untuk mendamaikan fraksi-fraksi yang berselisih di Kamboja.
5. Konsiliasi, merupakan upaya mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Misalnya, panitia tetap menyelesaikan masalah ketenagakerjaan mengundang perusahaan dan wakil karyawan untuk menyelesaikan pemogokan.
6. Toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi.

7. Stalemate, terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. Kemudian keduanya sadar untuk mengakhiri pertentangan. Misalnya, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur.
8. Ajudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. Misalnya, persengketaan tanah warisan keluarga yang diselesaikan di pengadilan (Soekanto 2006).

h. Aktor – Aktor

Kegiatan pengelolaan sumber daya alam tak lepas dari keterlibatan banyak pihak, mulai dari masyarakat (grass root) hingga pada perusahaan (industri kapital). Banyaknya aktor yang terlibat bukan berarti distribusi dalam mendapatkan manfaat sumber daya alam juga turut banyak ataupun merata dengan baik. Oleh karena itu konflik pun muncul dengan melibatkan banyak pihak dari luar, baik untuk mempertahankan kepentingan masing-masing ataupun untuk pendampingan penyelesaian konflik.

1. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal adalah aktor yang terlibat langsung dalam setiap kasus konflik sumber daya alam. Kepentingan mereka terhadap sumber daya alam adalah sebagai tempat bermukim dan untuk keberlangsungan hidup. Mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan adat mereka melalui cara- cara yang sudah turun-temurun dilestarikan. Namun sayangnya, sebagai aktor pemanfaat utama, masyarakat juga sebagai aktor yang paling pertama terkena dampak dari rusaknya sumber daya alam akibat keserakahan para korporat/kapitalis.

2. Swasta (Private Sector)

Swasta adalah aktor yang memiliki modal besar untuk melakukan usaha terhadap sumber daya alam dengan tujuan mengeruk keuntungan, baik skala perusahaan maupun individu. Biasanya para aktor swasta ini memberikan sedikit uang 'tali asih' yang diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat yang sudah memberikan lahannya. Banyak terjadi kasus yang melibatkan pihak swasta dengan masyarakat berakhir dengan konflik akibat dari pengingkaran 'janji-janji' pihak swasta kepada masyarakat. Orientasi profit bagi swasta adalah hal yang utama sehingga tak segan-segan swasta akan melakukan berbagai cara, seperti menipu, melakukan kekerasan, melakukan pengusiran, dan hal tak manusiawi lainnya demi tercapainya tujuan tersebut.

3. Pemerintah/Negara (*State*)

Pemerintah/negara (*state*) adalah aktor pengambil keputusan juga regulator yang sebenarnya paling berkuasa terhadap negara dan isinya. Kepentingannya terhadap sumber daya alam adalah penetapan terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam baik untuk kepentingan pembangunan maupun pelestarian (konservasi). Namun ditengah-tengah panasnya konflik, keberadaan negara (*state*) kemudian dipertanyakan. Sebagai institusi yang seharusnya menyejahterakan kehidupan rakyatnya, keberpihakan pemerintah/negara menjadi hal yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi masyarakat lokal. Sayangnya, negara pun seperti tak

memiliki kuasa dalam mengambil keputusan. Negara hanya berpatok pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, yang disayangkan juga, kebijakan tersebut pun pelaksanaannya disalahgunakan oleh oknum-oknum negara. Tak heran negara pun ternyata berusaha mengeruk pundi-pundi keuntungan dari sumber daya alam dengan dalih pembangunan dan peningkatan perekonomian, ataupun dengan dalih lainnya, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, para aparat negara berusaha mati-matian menjaga suatu kawasan dengan tidak mempedulikan manusia di sekitarnya, masyarakat lokal. Oleh karena itu, apapun akar masalah konfliknya, masyarakat lokal tetap dan selalu menjadi aktor yang terkena dampak langsung, karena dalam hal ini negara melupakan bagian dari dirinya, yaitu rakyat. Maka sudah menjadi hal yang lumrah ketika rakyat berontak atas ketidakadilan yang diterima dan kemudian tidak percaya lagi kepada negara.

4. Kelembagaan Masyarakat

Di lain sisi hadir aktor pemberi angin segar bagi masyarakat lokal yang sudah tidak memiliki daya dan upaya. Aktor tersebut adalah LSM ataupun gerakan sosial-gerakan sosial (akar rumput) yang memiliki tujuan bermacam-macam, antara lain bertujuan membela keadilan manusia. Akan tetapi, adapula LSM dan organisasi akar rumput yang kepentingannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beragamnya idealisme dari masing-masing LSM dan organisasi akar rumput akan menimbulkan konflik diantara sesama LSM dan organisasi

akar rumput, maka bukan tidak mungkin bila LSM dan organisasi akar rumput dapat membantu ataupun malah menjadi predator bagi masyarakat itu sendiri. Saling bertolak-belakangnya idealisme ini akan seperti bola salju bagi konflik itu sendiri, karena kehadiran masing-masing LSM dan organisasi akar rumput justru tidak memberikan perubahan kearah perbaikan namun malah memperparah keadaan. Hal ini terjadi akibat saling mempertarungkan ego masing-masing LSM dan organisasi akar rumput, sehingga lupa akan tujuan utama, yaitu menyelesaikan konflik itu sendiri.

i. Ideologi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Etika Lingkungan)

Tiap-tiap aktor yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam tentunya memiliki ideologi yang berbeda-beda dalam memandang suatu sumberdaya alam. Ideologi yang dianut dari suatu aktor menjadi poin penting dalam mengidentifikasi kepentingannya. Terdapat tiga ideologi (etika lingkungan) terhadap sumberdaya alam (Keraf 2010). Diantaranya adalah Antroposentris, biosentris, dan ekosentris. Antroposentris adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya.

Selanjutnya menurut model etika lingkungan biosentrisme, tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai

nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Ciri utama etika ini adalah biocentric, karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak.

Sedangkan teori ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme, sehingga sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme. Meskipun begitu, terdapat perbedaan diantara keduanya, biosentrisme hanya memusatkan etika pada komunitas biotis, pada kehidupan seluruhnya. Sedangkan ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu kewajiban moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup akan tetapi berlaku terhadap semua realitas ekologis.

2. Pembangunan

a. Pembangunan & industrialisasi di negara berkembang

Salim (2002: 263), menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perencanaan sosial (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sedangkan menurut Marzali (2005:

62), menyebutkan usaha pembangunan mengandung beberapa peringkat pengambilan keputusan, yaitu; penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Setiap peringkat pengambilan keputusan di atas dipercayai adanya keterlibatan faktor-faktor sosio-kultural.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana terhadap kondisi sosial, budaya dan lingkungan. Meskipun pembangunan telah dapat mewujudkan suatu perubahan, kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik, namun proses dari aktivitas kegiatan tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Merembaknya isu global yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan merupakan peringatan dini kepada manusia, bahwa kelangsungan hidupnya tergantung pada keutuhan manusia dan lingkungan. Sebaliknya, keutuhan lingkungan tergantung pada bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu, lingkungan hidup tidak semata-mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian hubungan antar manusia dan lingkungan hidup (Handoyo, dkk., 2010: 247).

Jadi, dilihat dari beberapa pengertian terkait dengan pembangunan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha terencana yang dilakukan oleh pemerintah

dengan mendirikan suatu fasilitas umum atau berupa perindustrian yang bertujuan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Menurut Lauer (2001: 411), industrialisasi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana porsi sumbangan industri secara umum dan khususnya manufaktur pada ekonomi atau komposisi penerimaan suatu negara meningkat. Biasanya sejalan dengan menurunnya sektor pertanian. Kondisi seperti ini yang terjadi di sejumlah negara berkembang. Industrialisasi yang ditandai dengan peningkatan proses produksi bukan hanya merubah pola hidup dan pola konsumsi masyarakat tetapi juga mendorong untuk mencari daerah pemasaran hasil industri. Selain mencari daerah pemasaran, mereka juga mencari bahan baku bagi industri yang sedang mereka kembangkan dan bahan-bahan kebutuhan lain yang tidak ada. Selain itu, industrialisasi juga dapat diartikan sebagai pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya dan kuantitas energi yang digunakan. Sedangkan menurut Kristeva (2015: 124-125), menyatakan bahwa industrialisasi adalah kekuatan progresif yang memanfaatkan teknologi kepada sumber daya alam dan membolehkan pengurangan ketergantungan kepada pertanian.

Fakih (dalam Kristeva, 2015: 78-79), menyatakan bahwa realitas pembangunan terkait erat dengan peran penting pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sebagian besar bangsa Dunia Ketiga, penafsiran konsep pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum

dalam standar hidup. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara lainnya. Dari perspektif ini, peran pemerintah menjadi subjek pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai obyek, resipien atau penerima, klien bahkan partisipan pembangunan.

Pendapat dari Gerschenkron (dalam Samekto, 2005: 70), menyatakan bahwa makin terlambat suatu negara melakukan proses industrialisasi, makin diperlukan campur tangan negara. Oleh karena itu, mau tidak mau negara harus terlibat dalam proses pembangunan ekonomi. Keterlibatan negara dalam proses pembangunan ekonomi inilah yang kemudian mendorong negara untuk terjun langsung dalam proses ekonomi, seperti; melakukan akumulasi modal, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, mendorong terciptanya dunia usaha serta campur tangan dalam regulasi di bidang industri dan perdagangan.

Emil Salim (dalam Supriadi, 2006: 39), masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.

Kegiatan pembangunan masyarakat di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) terutama masih fokus pada isu- isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tendensi demikian terjadi karena jumlah penduduk miskin di negara-negara berkembang masih tinggi dan amat rentan dengan kondisi krisis ekonomi. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan tersebut semakin pelik ketika mereka harus berhadapan dengan kapitalisme global yang semakin serakah mengeksploitasi sumber daya alam (Usman, 2015: 4). Pembangunan sejauh ini keliru karena hanya memberi tempat yang seluasnya dan dominan kepada pembangunan dan kepentingan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan dan kepentingan lingkungan dan sosial-budaya (Keraf, 2010: 119).

b. Tujuan dan orientasi pembangunan

Iskandar (dalam Handoyo, dkk., 2010: 249), tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan warga masyarakat. Pembangunan, dalam hal ini dilihai pula sebagai usaha terencana untuk mengubah kebudayaan suatu masyarakat yang semula kurang efektif dan kurang efisien dalam hal kegunaannya untuk pemenuhan kebutuhan dan taraf kesejahteraan para pendukungnya, menjadi lebih efektif dan efisien dalam kegunaannya untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumberdaya energi yang ada dalam lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia. Sedangkan tujuan pembangunan menurut Sen

(dalam Handoyo, dkk., 2010: 250), adalah suatu proses memperluas kebebasan yang nyata dimana orang dapat menikmati, yakni penghapusan sumber utama kebebasan, seperti; kemiskinan, tirani, kesempatan ekonomi bagi kaum miskin dan perampasan sosial secara sistematis, pengabaian publik dan tiadanya toleransi atau aktivitas lainnya dari rezim represif.

Pembangunan memiliki orientasi bermakna ganda. Tipe pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Tipe kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial dimana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya disskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan dari pembangunan pada seluruh masyarakat (Hadi, 2012: 21).

c. Pembangunan berkelanjutan (strategi dan prinsipnya)

Definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED (World Comission on Environment and Development), menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan

kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Hadi, 2012: 43).

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan, diantaranya yaitu; tidak adanya perangkat norma yang mengatur interaksi antara individu dengan lingkungan, tidak adanya sarana pembinaan lingkungan, egoisme manusia, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, ambisi yang tidak pernah memuaskan, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, oleh sebab itu, perlu kiranya mengubah paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang memperhatikan kesinambungan kebutuhan antar generasi dan yang lebih menghendaki terwujudnya pembangunan sosial dimana peran serta masyarakat dan visi keadilan menjadi bagian di dalamnya (Handoyo, dkk., 2010: 258-259).

Pembangunan yang selalu menempatkan dimensi ekonomik sebagai pertimbangan dominan, akan cenderung menempatkan faktor lingkungan sebagai penghambat pembangunan, padahal seharusnya arah yang harus dituju adalah mengharmoniskan antara pembangunan

ekonomi dengan aspek lingkungan. Jika perkembangan ekonomi yang diperoleh melalui pembangunan tanpa menyentuh prinsip-prinsip etika pembangunan yang mendasarinya maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak akan menghasilkan perbaikan kualitas hidup (Poerwanto, 2005: 158 & 161).

Iskandar (dalam Handoyo, dkk., 2010: 260), salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Laporan dari KTT Dunia 2005, menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekologi (lingkungan), ekonomi, dan sosial, dengan aspek ekologi dan ekuitas sosial sebagai aspek utama yang saling bergantung dan memperkuat.

Emil Salim (dalam Hadi, 2012: 3-4), mengemukakan strategi pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di negara-negara berkembang, adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan harus memperhatikan kapasitas lingkungan alam dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Sumber daya alam dibagi kedalam sumber yang harus dikoservasi dan dilindungi dan sumber yang bisa dieksploitasi.

- 2) Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan, seperti; standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, air laut dan udara di kota dan daerah pedesaan. Dengan adanya standar, kegiatan industri tidak diizinkan untuk membuang limbah melebihi baku mutu sehingga kualitas lingkungan akan bisa lebih dijamin.
- 3) Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Setiap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Setelah dampak penting diidentifikasi, diperkirakan, dan dievaluasi, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan pemantauan dampak.
- 4) Rehabilitasi kerusakan lingkungan khususnya di daerah yang kritis, seperti sungai-sungai yang menjadi tempat pembuangan dan di lahan kritis.
- 5) Pertimbangan lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan. Kebijakan ekonomi yang menimbulkan dampak pada lingkungan perlu dievaluasi.

Pembangunan berkelanjutan menurut Hadi (2012: 44-48), harus memenuhi empat prinsip untuk mewujudkannya, yaitu:

1) Pemenuhan kebutuhan manusia (fulfillment of human needs)

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia termasuk didalamnya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan non materi, meliputi; rasa aman, hak asasi manusia, memiliki kesempatan untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat.

2) Pemeliharaan lingkungan

Prinsip pertama dalam pemeliharaan lingkungan adalah konservasi, yaitu perlindungan lingkungan. Lingkungan baik sebagai sumber daya maupun ruang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumber daya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Setiap usaha atau kegiatan harus diatur agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sebagai ruang. Prinsip pemeliharaan lingkungan ini, sangat erat kaitannya dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar, dimana kerusakan lingkungan akan menghambat pemenuhan kebutuhan manusia.

3) Keadilan social

Prinsip keadilan menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Tanpa pemerataan akan menimbulkan ketimpangan sebagaimana yang terjadi pada pembangunan di era Orde Baru dimana yang menikmati hasil pembangunan hanya sekelompok kecil masyarakat. Keadilan juga berdimensi luas, termasuk didalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi.

4) Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri, meliputi; prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatory demokrasi. Masyarakat mandiri (self reliant community) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya, termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Prinsip partisipatori demokrasi berwujud keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka, maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses, sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Pandangan lain dari Robinson (dalam Mitchell, 2003: 36-37), prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi dua prinsip, yaitu:

1) Prinsip lingkungan/ekologi, meliputi:

- a) Melindungi sistem penunjang kehidupan.
- b) Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik.
- c) Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak.
- d) Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.

2) Prinsip sosio-politik, meliputi:

- a) Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut.
- b) Meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi.
- c) Meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi.
- d) Meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan (equality) dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan potensi penuh sebagai manusia, sumber daya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari represi politik, akses ke pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapat informasi dan kebebasan beragama, berbicara, dan bertindak.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli mengenai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meliputi; pemenuhan kebutuhan manusia, memperhatikan kelestarian lingkungan, mencegah dan mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan, dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kreatif dalam politik maupun ekonomi.

d. Pembangunan dalam perspektif sosial dan moral

Pembangunan merupakan suatu proses yang ditimbulkan demi terciptanya kondisi kemajuan ekonomi, dan sosial. Tujuan tersebut agar dapat berhasil dengan baik, maka pembangunan dibutuhkan beberapa prasyarat, antara lain (dalam Ranjabar, 2015: 166-170):

- 1) Faktor ekonomis yang primer, antara lain; sumber alam yang kaya, tenaga kerja massal dan modal yang cukup.
- 2) Faktor sosial budaya

Para ahli sepakat bahwa faktor sosial budaya merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menyukseskan pembangunan. Pembangunan yang mengenyampingkan faktor sosial budaya dikatakan tidak akan berhasil walaupun kekayaan ekonomis primer melimpah ruah. Kekayaan ekonomis primer tergantung kepada mentalitas, pola hubungan kemasyarakatan, norma kebudayaan. Dengan kata lain, bahwa mentalitas ditentukan faktor demografis, struktur masyarakat, dan adat istiadat.

Berikut adalah penjelasannya:

a. Faktor demografis

Pertumbuhan penduduk yang cepat melaju akan menimbulkan involusi terhadap kenaikan produksi pangan. Pertambahan penduduk tidak diimbangi kenaikan produksi pangan sehingga akan terjadi kemiskinan-kemelaratan.

b. Faktor struktur masyarakat

Pola hubungan kemasyarakatan maupun kebudayaan berpengaruh terhadap usaha pembangunan karena memengaruhi cara berpikir. Setiap kebudayaan mempunyai norma dan nilai yang berbeda, sehingga memengaruhi cara bertindak dan cara berpikir anggota masyarakat.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu, komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

c. Faktor mental

Faktor mental berkaitan dengan sistem nilai budaya dan sikap.

Faktor mental yang mendorong pembangunan, yaitu antara lain:

- 1) Menaruh perhatian dan menilai tinggi hal yang bersifat materiil.
- 2) Menilai tinggi teknologi, dalam hal ini untuk mendorong penggunaan mekanisme dan industrialisasi.
- 3) Berorientasi ke masa depan.
- 4) Keberanian mengambil resiko.
- 5) Jiwa yang tabah.
- 6) Kemampuan bekerjasama secara berdisiplin dan bertanggungjawab.

Faktor mental yang menghambat pembangunan, yaitu antara lain:

- 1) Nilai budaya memandang alam sebagai sesuatu hal yang dahsyat. Pandangan selalu menekankan keserasian dengan alam, jangan merubah alam. Sikap nerimo yang merupakan pencerminan cultural of poverty merupakan musuh pembangunan.
- 2) Nilai budaya yang memuja masa silam, masa kejayaan nenek moyang yang bernostalgia tanpa memungut hasil dari pengalaman masa lalu.
- 3) Nilai budaya yang mementingkan kedudukan daripada karya.
- 4) Nilai budaya yang berorientasi vertikal, atasan sebagai panutan, asal bapak senang (ABS). Hal ini menggambarkan bahwa pekerja giat bila atasan ada.

d. Faktor pendidikan

Pembangunan menuntut perubahan sikap baik dalam lapangan kognitif maupun psikomotorik. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Keterampilan teknologi merupakan tuntutan pembangunan dan penyiapan tenaga, hal ini harus melalui pendidikan.

Todaro dan Smith (dalam Handoyo, dkk., 2010: 253-255), ada tiga nilai dasar atau inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki, ketiga nilai tersebut, yaitu:

- 1) Kecukupan hidup (life-sustenance), merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang

jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini, meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

- 2) Harga diri (self-esteem), yakni menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah dorongan dari diri individu manusia untuk maju, menghargai diri sendiri, untuk merasa dia pantas dan layak melajukan atau mengejar sesuatu.
- 3) Kebebasan (freedom) dari sikap menghamba: kemampuan untuk memilih. Kebebasan manusia diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak, sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan.

Berdasarkan ketiga nilai inti pembangunan tersebut, maka proses pembangunan di masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan inti pembangunan sebagai berikut; pertama, peningkatan ketersediaan dan perluasan berbagai distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan pengertian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, serta dapat menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Handoyo, dkk., 2010: 255-256).

e. Mentalitas petani terhadap pembangunan

Berdasarkan kerangka Kluckhohn (dalam Sajogya, 2005: 14), sistem nilai budaya petani Indonesia, terutama di Jawa, menganggap bahwa hidupnya

itu sebagai sesuatu hal yang buruk, penuh dosa, kesengsaraan, tetapi tidak berarti bahwa ia harus menghindari hidup yang nyata dan mengundurkan diri dengan bersembunyi di alam kebatinan atau dengan bertapa. Ia wajib menyadari keburukan hidup itu dengan berlaku prihatin dan ikhtiar. Orang petani di Indonesia bekerja untuk hidup, kadang-kadang kalau mungkin untuk mencapai kedudukan. Ia hanya mempunyai perhatian untuk hari sekarang ini, bagaimana keadaan hari kemudian, ia tidak peduli; ia terlampau miskin untuk dapat memikirkan hal itu; hanya kadang-kadang ia rindu akan masa yang lampau, yang menurut dongeng-dongeng orang tua merupakan suatu masa kejayaan itu.

Pada umumnya, alam tidak mengerikan baginya, kecuali ia dapat menyelaraskan diri saja dengan alam sekitarnya, maka amanlah hidupnya. Ia harus sadar bahwa dalam hidupnya itu, hakikatnya tergantung kepada sesamanya, maka dari itu, ia harus selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya.

Sajogya (2005: 15-17), menganalisis kerangka Kluckhohn, sebagai berikut:

1) Hakikat hidup

Hidup pada hakikatnya buruk, tetapi untuk diikhtiarkan menjadi suatu hal yang baik dan menyenangkan adalah suatu hal yang cocok untuk pembangunan, karena ikhtiar dan usaha itu merupakan sendi-sendi penting dari segala aktivitas berproduksi dan membangun.

2) Hakikat karya

Nilai budaya yang menganggap bahwa manusia itu kerja untuk hidup saja, tidak cocok untuk pembangunan ekonomi. Orang yang bernilai budaya serupa itu akan bekerja keras sampai ia dapat menghasilkan apa yang dibutuhkannya untuk hidup, sedangkan kebutuhan untuk kerja lebih lanjut supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi, tidak akan ada. Suatu mentalitas yang lebih cocok untuk pembangunan, sebenarnya harus mengandung pandangan yang menilai tinggi karya untuk mencapai suatu kedudukan yang dapat menghasilkan lebih banyak kerja lagi.

3) Hakikat kedudukan manusia dalam ruang waktu

Berorientasi terhadap hari sekarang dan kurang memperhitungkan hari depan, tidak cocok untuk pembangunan ekonomi. Hal itu disebabkan karena pembangunan yang hendak berhasil baik dan sebenarnya tiap-tiap usaha ekonomi membutuhkan perencanaan dan kemampuan untuk merencanakan itu, tidak lain dari suatu kemampuan untuk melihat setajam mungkin, apakah yang akan dapat terjadi di hari depan.

4) Hakikat hubungan manusia dengan alam

Petani Indonesia biasanya tidak merasa tunduk pada alam, sebaliknya mereka juga tidak merasa mampu untuk menguasainya. Konsepsi bahwa orang itu harus hidup selaras dengan alam adalah suatu konsepsi yang lazim dalam mentalitas petani di Indonesia (Koentjaraningrat, 2002: 40). Mentalitas yang berusaha mencari keselarasan dengan alam, tidak secara

langsung menghambat pembangunan ekonomi, maka dari itu tidak perlu robah secara mendesak.

5) Hakikat hubungan manusia dengan sesamanya

Petani di Indonesia biasanya menghadapi sesamanya dengan jiwa gotong-royong. Mentalitas yang berdasarkan jiwa gotong royong, tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan, bisa juga menghambat pembangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pegunungan Kendeng di Rembang menyimpan kekayaan alam yang melimpah diantaranya bahan baku pembuatan semen. Alasan inilah yang kemudian muncul inisiatif dari PT. Semen Indonesia Tbk, untuk mendirikan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai berikut :

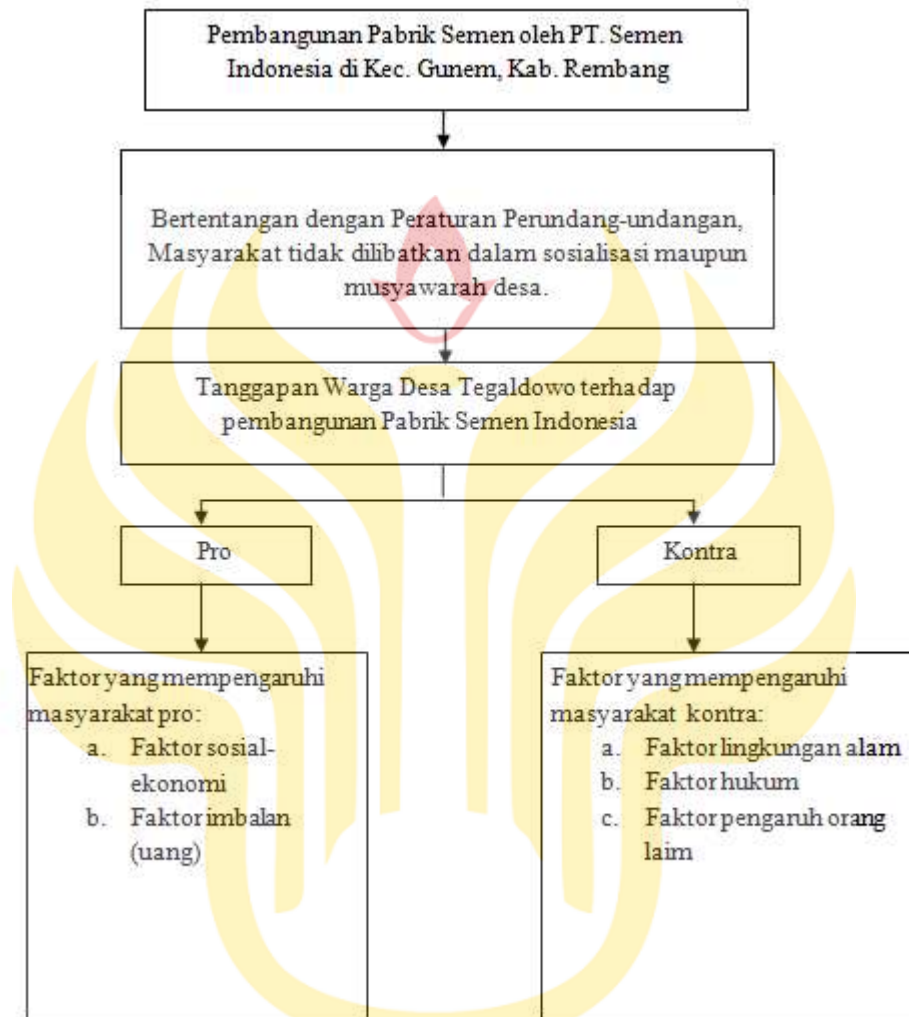
Pegunungan Kendeng di Rembang menyimpan kekayaan alam yang melimpah diantaranya adalah bahan baku pembuatan semen. Karena alasan inilah muncul inisiatif dari PT. Semen Indonesia Tbk untuk mendirikan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang menimbulkan tanggapan pro, kontra, maupun netral dari masyarakat. Pihak

masyarakat yang kontra menganggap bahwa pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011, Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang, Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah. Mereka menganggap isi AMDAL tidak sesuai kenyataan di lapangan, prosedur AMDAL tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku, tidak dilibatkan dalam sosialisasi maupun musyawarah desa, sehingga muncul kecemasan, rasa khawatir warga Desa Tegaldowo yang menganggap bahwa penambangan bahan baku untuk pembuatan semen justru akan berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan, hilangnya sumber mata air di sekitar lokasi pertanian, sehingga akan merugikan warga masyarakat. Sedangkan pihak warga masyarakat yang pro menganggap bahwa pembangunan pabrik semen akan berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat yang netral, masih bimbang untuk mendukung atau menolak pabrik semen.

Faktor yang berpengaruh terhadap tanggapan masyarakat yang pro terhadap pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yaitu faktor sosial-ekonomi dan faktor imbalan (uang). Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap tanggapan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen yaitu faktor lingkungan alam, faktor hukum, faktor isi AMDAL yang janggal dan kurang transparan, faktor kebudayaan, serta faktor pengaruh orang lain. Sedangkan Faktor yang berpengaruh pada sikap perempuan yang netral terhadap pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yaitu faktor untung-rugi dan faktor perasaan bimbang.

Berikut adalah alur kerangka berpikir penelitian:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tanggapan yang muncul dari masyarakat terbagi menjadi dua yaitu pro dan kontra. Tanggapan masyarakat Desa Tegaldowo terhadap pembangunan Pabrik Semen Indonesia, dilihat dari segi pengetahuan, sikap dan tindakan yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Masyarakat yang pro, meliputi:
 - a. Pengetahuan masyarakat yang pro terhadap pabrik semen yaitu proses penjualan tanah dari warga ke makelar tanah dilakukan secara sukarela dan akan digunakan untuk penambangan batu, bukan penambangan besar oleh pabrik semen, mereka mengetahui adanya musyawarah desa dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dan pihak PT. Semen Indonesia sebelum pabrik semen dibangun.
 - b. Tindakan yang dilakukan masyarakat yang pro, pertama yaitu selalu mengikuti sosialisasi dan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun PT. Semen Indonesia. Kedua, melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur maupun di depan Istana Presiden untuk menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Tegaldowo banyak yang setuju.

2. Masyarakat yang kontra, meliputi:
 - a. Pengetahuan masyarakat yang kontra terhadap pabrik semen yaitu proses penjualan tanah yang dilakukan warga ke makelar tanah akan digunakan untuk penghijauan, tidak diperuntukkan untuk rencana penambangan oleh pabrik semen, tidak mengetahui adanya musyawarah desa dan sosialisasi karena tidak pernah melibatkan warga masyarakat yang kontra.
 - b. Tindakan yang masyarakat lakukan untuk menolak pabrik semen yaitu mendirikan tenda perjuangan di sekitar tapak pabrik semen selama \pm 2,8 tahun sejak peletakan batu pertama tanggal 16 Juni 2014, studi banding ke Tuban untuk membuktikan dampak negatif akibat adanya pabrik semen, melakukan unjuk rasa di Tapak Pabrik Semen, demo di gedung DPRD Rembang, demo di Kantor Gubernur Jateng, melakukan gugatan ke PTUN, Peninjauan Kembali (PK) ke MA), melakukan pengecoran kaki di depan Istana Presiden.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial dilihat dari masyarakat yang pro yaitu faktor sosial-ekonomi dan faktor imbalan (uang). Mereka mendukung karena dengan adanya pabrik semen dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tegaldowo. Membuka lowongan pekerjaan bagi warga dan kemajuan bagi Desa Tegaldowo. Sedangkan pada masyarakat yang kontra terhadap adanya pabrik semen yaitu faktor lingkungan alam dan faktor hukum.

B. Saran

Dengan adanya penelitian mengenai konflik sosial pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Keterlibatan warga di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting, seharusnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pemerintah melibatkan peran aktif dari warga. Pada dasarnya warga yang akan merasakan manfaat dan dampak langsung dari pembangunan yang dilaksanakan, sehingga keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan menjadi sangat penting untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial.
2. Sebagai alternatif penyelesaian konflik, pemerintah perlu melakukan upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi. Negosiasi dilakukan untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu warga, pemerintah serta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sehingga diperoleh keluaran konflik yang saling menguntungkan (win-win solution).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwicipta & Hendra Try Ardianto. 2015. #Rembang Melawan. Yogyakarta: Literasi Press.
- Hadi, Sudharto P. 2012. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gajahmada Mada University Press.
- Handoyo, Eko, dkk. 2010. Etika Politik dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya.
- Keraf, A. Sonny. 2010. Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2007. Politik dan Perempuan. Depok: Koekoesan.
- Lauer, Robert H. 2001. Perspektif tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mar'at. 1982. Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Marzali, Amri. 2005. Antropologi dan Pembangunan Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Poerwanto, Hari. 2005. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sajogya, Pudjiwati. 2005. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: UGM Press.
- Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial (Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia). Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Samekto, Fx. Adji. 2005. Kapitalisme, Modernisasi & Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi. 2006. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampubolon, Manahan P. 2012. Perilaku Keorganisasian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Skripsi:

- Cahyati, Resti Sri. 2014. Respons Masyarakat Terhadap Pembangunan Pabrik Semen di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Skripsi. Bandung: FPIPS UPI.
- Mawahibun, Addi Idhom. 2009. Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen di Pegunungan Kendeng Sukolilo Pati Jawa Tengah.
- Nur, Wiwin A, dkk. 2014. Dampak Negatif Industri PT. Semen Indonesia terhadap Masyarakat Desa Temandang. Surabaya: Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
- Yuwono, Agust Eko. 2010. Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Desa Kedumulyo Kec. Sukolilo Kab. Pati. Skripsi. Semarang: Prodi Sosiologi dan Antropologi, FIS Unnes.

Jurnal Ilmiah:

- Hartoyo. 2013. Resistensi Petani terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
- Nurmeida, Avid, dkk. Analisis terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Semarang: Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro.
- Pongoh, Fransiska Y.V. 2015. Sikap Masyarakat terhadap Pembangunan Berbasis Lingkungan (PBL) Mapaluse di Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2015. Peran Perbankan Dalam Pengembangan Industri Semen Di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang. Laporan Penelitian.
- Tim Pelaksanaan KLHS. 2017. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap 1 Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih & Sekitarnya, Kabupaten Rembang.

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

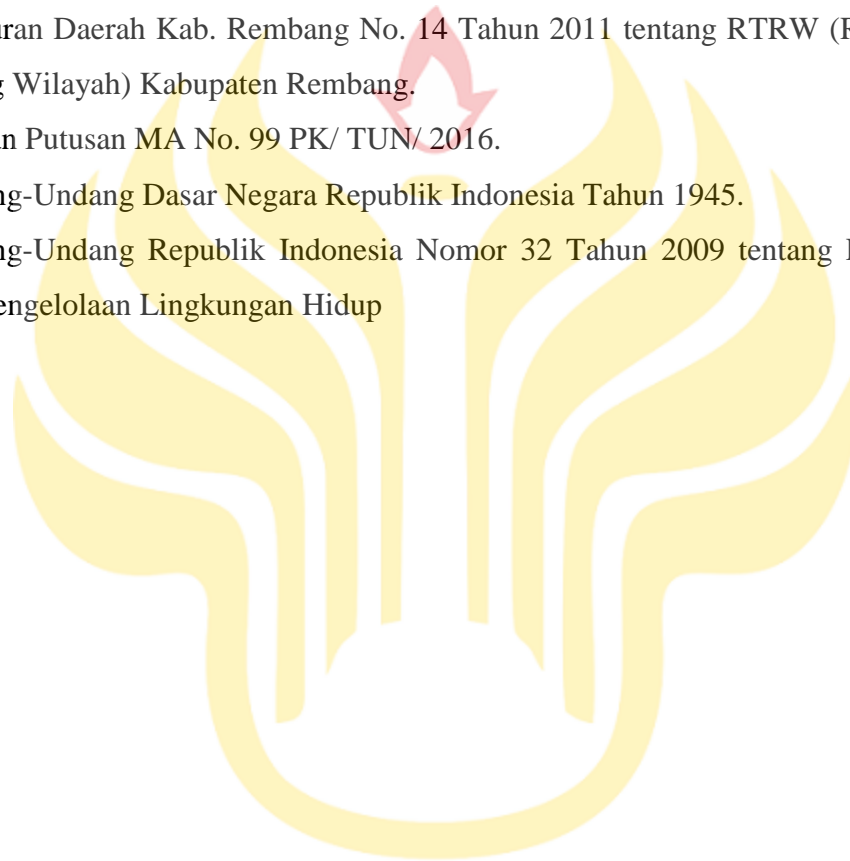
Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Rembang.

Salinan Putusan MA No. 99 PK/ TUN/ 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG